

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa hasil wawancara, observasi serta kepustakaan yang telah dianalisis dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dari hal itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan pengendalian internal atas kas pada PT Aritra Prima Abadi belum terlaksana dengan sepenuhnya sesuai dengan unsur pengendalian internal Mulyadi. Terdapat 4 (empat) unsur pengendalian internal Mulyadi yaitu : Pertama, unsur struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, unsur sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Ketiga, unsur praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Keempat, unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Diantara unsur pengendalian internal tersebut, hanya unsur sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang sudah diterapkan sepenuhnya atas penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Aritra Prima Abadi. Untuk unsur struktur organisasi, praktik yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab belum terlaksana dengan sepenuhnya.
2. Adapun kekurangan dalam penerapan pengendalian internal atas kas pada PT Aritra Prima Abadi yang belum terlaksana sesuai dengan dengan unsur pengendalian internal Mulyadi yaitu perusahaan tidak melakukan pemisahan fungsi fungsi yang terkait kas. Perusahaan belum memenuhi unsur praktik yang sehat. Serta perusahaan belum mengatur adanya kebijakan program pengembangan pendidikan bagi karyawannya. Kekurangan terjadi karena adanya keterbatasan yang membuat perusahaan belum memenuhi unsur pengendalian internal Mulyadi adalah perusahaan belum memperkirakan dan mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk unsur pengendalian internal itu sendiri

5.2. Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, masih terdapat kekurangan pada penerapan pengendalian internal atas kas pada PT Aritra Prima Abadi. Untuk itu penulis mengemukakan saran yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi serta mengambil langkah yang tepat atas penerapan pengendalian internal atas kas yang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan unsur pengendalian internal Mulyadi. Berikut saran penulis, yaitu:

1. Sebaiknya pimpinan PT Aritra Prima Abadi melakukan pemisahan tanggung jawab fungsional sehingga semua tahap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak diselesaikan oleh satu unit bagian saja. Seperti untuk penerimaan kas seharusnya ada pemisahan fungsi akuntansi, fungsi penagihan, dan fungsi penerimaan. Serta untuk pengeluaran kas seharusnya ada pemisahan fungsi penyimpanan kas, fungsi akuntansi, dan bagian kasa (kasir). Pemisahan tanggung jawab fungsional tersebut tentunya dilakukan dengan adanya pertimbangan baik dari segi biaya dan manfaat pemisahan tanggung jawab fungsional.
2. Sebaiknya PT Aritra Prima Abadi melakukan pengecekan secara rutin dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas agar tercapainya keefektifan pengendalian internal atas serta mengamankan aset yang dimiliki perusahaan tanpa adanya penyalahgunaan dan kecurangan.
3. Sebaiknya PT Aritra Prima Abadi melaksanakan rekonsiliasi bank secara teratur untuk memastikan penerimaan, pengeluaran serta saldo kas yang ada di Bank sesuai dengan catatan akuntansi di perusahaan. Disamping itu perusahaan perlu mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang dilakukan karyawan yang berhubungan langsung dengan kas dengan cara mengasuransikan karyawan tersebut (bagian keuangan), serta mengasuransikan kas tersebut sehingga jika kecurangan terjadi, asuransi akan menanggung risiko kerugian yang timbul.
4. Sebaiknya manajemen mulai membuat kebijakan pengembangan karyawan seperti mengadakan kegiatan pelatihan – pelatihan, pembinaan atau pendidikan kepada para pegawai sebagai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Tujuan kebijakan tersebut dilakukan adalah untuk meningkatkan

kompetensi dan keahlian pegawai khususnya pada pegawai bagian keuangan agar unit perusahaan tersebut dapat lebih berkompeten dalam menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Kebijakan pengembangan karyawan tentunya harus dilakukan dengan adanya pertimbangan biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut.

